

BAB IV
COUNTER CHINA TERHADAP NILAI BARAT
MELALUI COMMUNITY OF COMMON DESTINY
DALAM PROYEK ONE BELT AND ONE ROAD
(OBOR)

Bab ini akan menjelaskan pertentangan nilai antara China dan Barat yang melandasi terbentuknya *community of common destiny*. Pasar bebas dan pemerintahan ekonomi global menjadi isu utama perdebatan China dan Barat, terutama antara kapitalisme dan sosialisme dengan karakteristik China. *Community of common destiny* merupakan aktualisasi dari sosialisme dengan karakteristik China untuk transformasi globalisasi ala Barat menjadi globalisasi ala China, yang diwujudkan dalam proyek *One Belt One Road* (OBOR).

A. Sosialisme dengan Karakteristik China Versus Globalisasi Ekonomi Ala Barat dalam Perumusan “Community of Common Destiny”

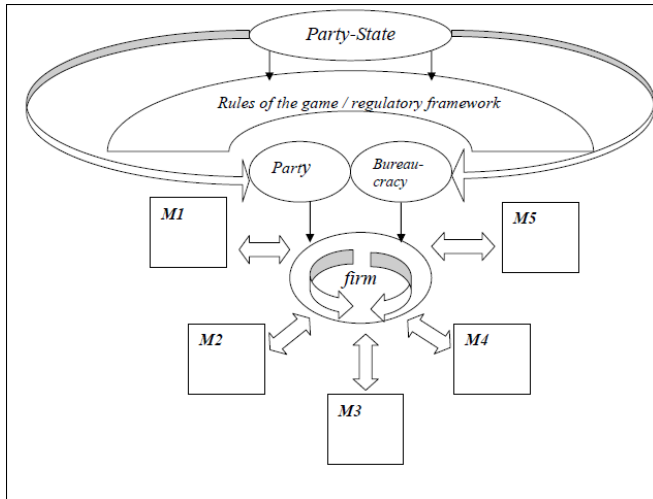
Sebagai negara penganut sistem sosialis, China memiliki penafsiran tersendiri terhadap globalisasi ekonomi yang dipimpin oleh sistem kapitalisme Barat. Seperti pada isu pasar bebas, China mengubah sistem kapitalisme menjadi sosialisme dengan karakteristik China. Ciri utama yang ditonjolkan China dalam sistem pasar bebasnya adalah campur tangan negara dalam proses masuknya perusahaan asing ke China.

Dalam karyanya yang berjudul *Capitalism and Freedom* tahun 1962, Milton Friedman menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi dalam pasar bebas juga merupakan prasyarat bagi kebebasan politik (Zupan, 2011: 171). Politik dan ekonomi merupakan dua hal saling berkaitan. Friedman berpandangan bahwa ketika negara ingin menerapkan pasar bebas, maka sistem politiknya harus direformasi sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan. Hal itu bertujuan agar masyarakat dibebaskan

untuk mendirikan usaha produksinya sendiri tanpa kendali pemerintah. Namun, faktanya beberapa negara masih campur tangan dalam pasar bebas, seperti yang dilakukan oleh China.

Seperti yang dikatakan oleh Brian Brenberg, Profesor Bisnis dan Ekonomi King's Collage, bahwa China telah melanggar peraturan perdagangan yang disepakati dalam *World Trade Organization* (WTO). China dianggap terlibat terlalu jauh dalam menentukan regulasi pasar. Berdasarkan prinsip pasar bebas, sebuah pasar bebas seharusnya berjalan secara *laissez faire*, dan perusahaan sebagai garda depan. Namun, China menerapkan regulasi pasar yang tidak masuk akal untuk Amerika Serikat, bahwa setiap perusahaan asing yang akan membuka bisnis di China harus menyerahkan enkripsi perusahaannya kepada pemerintah China dengan alasan keamanan nasional. Enkripsi tersebut disalahgunakan China untuk memanipulasi produk Barat sehingga dapat menjualnya lebih murah (Fox Business, "*How China Abuses Free Trade*", 06 April 2017).

Sementara itu, China menanggapi dengan memberikan pemahaman tentang pasar bebas yang berjalan di China melalui bagan berikut:



Gambar 4.1 Bagan *politized capitalism* oleh China

Ket: M1 to M5 identify different market types (i.e., labor, commodity, product and capital markets).

Sumber: (Nee & Oppor, 2006)

Bagan tersebut menggambarkan sistem pasar bebas ala China yang berprinsip pada “sosialisme dengan karakteristik China”, dengan negara mempengaruhi sistem pasar. Melalui *Regulatory framework*, China berperan penuh untuk menjaga stabilitas dominasi pemerintah agar tidak terkikis oleh pengaruh pasar bebas ala Barat. Tujuan campur tangan negara yakni untuk memastikan bahwa sistem pasar berjalan dengan merata dan saling menguntungkan. (Nee & Oppor, 2006).

Selain itu, China merancang sekuritisasi pasar untuk membawa modal swasta atau asing ke dalam perusahaan negara melalui batas-batas ketat “sosialisme pasar” yang dikendalikan oleh negara. Pertama, melalui pengaturan proses pencatatan dan sistem kuota saham, pemerintah memastikan bahwa negara –bukan perusahaan swasta atau asing– memiliki akses prioritas terhadap modal investasi. Kedua, melalui peraturan klasifikasi saham, pemerintah juga memastikan bahwa modal swasta masuk

ke perusahaan negara sebagai saham individu tetap berada di bawah dominasi saham mayoritas negara dan saham badan hukum. Ketiga, melalui peraturan transfer yang melarang perdagangan saham negara dan badan hukum, pemerintah memastikan bahwa negara mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas yang paling dominan. (Cao, 2001: 58). Seperti itulah cara China mentransformasi nilai kapitalisme dalam pasar bebas menjadi sosialisme ala China.

Oleh karena sistem tersebut, China percaya diri untuk mempromosikan sistem pasar bebas dengan nilai sosialisme. Dalam *World Economic Forum* (WEF) yang digelar bulan Januari tahun 2017 di Davos, Presiden Xi Jinping dalam pidatonya menyampaikan bahwa “kita harus tetap berkomitmen untuk mengembangkan perdagangan bebas secara global dan investasi ... dan katakan tidak pada proteksionisme”. Menyambut pidato utama Xi Jinping, pendiri WEF dan Kepala Eksekutif Klaus Schwab mengatakan bahwa pidato pemikiran Xi akan memetakan jalannya ekonomi global dan WEF bersedia untuk memperkuat kemitraannya dengan China. Xi menyatakan bahwa inklusivitas sangat diperlukan dalam menghadapi globalisasi untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal (Xinhuanet, “*Commentary: Xi and His Better Version of Globalization*”, 18 Januari 2017). Itu mengindikasikan globalisasi baru dengan karakteristik China.

Pada waktu yang sama saat Presiden Xi Jinping berpidato, Perdana Menteri Inggris Theresa May menyatakan “Hard Brexit” dengan rencana Inggris meninggalkan *European Single Market*. Kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh Amerika Serikat ketika Presiden Donald Trump mengumumkan keluarnya Amerika Serikat dari *Trans Pacific Partnership* (The Diplomat, “*Globalization with Chinese Characteristics: A New International Standard?*”, 9 Mei 2017). Kedua negara tersebut menganggap bahwa pasar bebas lambat

laun akan merugikan mereka dengan sistem pasar yang mulai dicurangi oleh China dan negara lainnya yang masih menerapkan sistem proteksionisme.

Disisi lain, Amerika Serikat menegaskan bahwa China harus mereformasi sistem sosial dan politik sekitaran demokratisasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil, agar liberalisasi ekonomi dapat stabil. Namun, China menolak gagasan tersebut dan terus mengkampanyekan penolakan pada nilai-nilai Barat. China berupaya membuktikan bahwa globalisasi ala China akan berjalan stabil tanpa menggunakan sistem kapitalisme. (The Diplomat, “*Globalization with Chinese Characteristics: A New International Standard?*”, 9 Mei 2017).

Selain itu, perdebatan keduanya juga nampak dalam pemerintahan ekonomi global, khususnya bagian keuangan internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. China memulai dengan mereformasi institusi perbankan agar sesuai dengan perkembangan globalisasi dan pembangunan negara berkembang sesuai karakteristik China. Pada bulan April, China memperbarui sistem perbankan. Pemerintah membagi perbankan China dalam tiga jenis yakni komersial, kebijakan, dan pembangunan (Murphy, 2016).

Bank komersial memiliki sistem simpan-pinjam secara umum dan batasan peminjaman yang dikhususkan untuk masyarakat dan pengusaha. Sementara bank kebijakan berfokus pada pembiayaan proyek kebijakan negara, seperti Bank Pembangunan Pertanian China dan Bank Ekspor-Impor China. Kemudian, bank pembangunan merupakan sistem perbankan yang baru dikeluarkan China untuk proyek *One Belt and One Road* (OBOR). Bank pembangunan secara khusus membiayai pembangunan infrastruktur, jalur kereta cepat, koridor ekonomi, dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan OBOR. *China Deveopment Bank*, *Silk Road Fund*, dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) merupakan

perwujudan dari bank pembangunan (Elliott & Yan, 2013: 12-13).

Kepala Redaksi Jaringan Keuangan CCTV Niu Wenxin menulis sebuah komentar dalam *China Economic Weekly* pada bulan Maret 2015. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukan AIIB mematahkan monopoli institusi Bretton Woods di lingkup pembiayaan pembangunan. Ia pun menegaskan bahwa target pinjaman infrastruktur yang lebih murah dapat menghasilkan “keajaiban ekonomi kedua Asia”. Berpegang pada prinsip bahwa China adalah negara berkembang yang memahami kebutuhan negara-negara berkembang lainnya, Niu menyuarakan bahwa Bank Dunia dan IMF telah menjadi “alat imperialisme” (Murphy, 2016: 250).

AIIB menawarkan konsep baru yaitu keterlibatan antara negara maju dan negara berkembang dalam pembiayaan pembangunan, dimana kedua negara diposisikan setara. Hal itu berbeda dengan sistem paternalistik yang berlaku di IMF, yaitu hubungan hirarki antara negara maju dan negara berkembang. China telah mengadaptasi dan merekayasa fungsi pembiayaan proyek Bank Dunia dengan fungsi stabilisasi keuangan dan manajemen krisis IMF untuk membentuk AIIB (Murphy, 2016: 250).

Perbedaan antara China dan Barat dalam melihat sistem pasar bebas dan pemerintahan ekonomi global memberikan satu kesimpulan bahwa nilai sosialisme China sangat kuat dalam menginterpretasikan isu-isu global. Menjawab tantangan Amerika Serikat perihal reformasi sosial dan politik, China merumuskan platform yang mempromosikan sosialisme dengan karakteristik China kepada dunia, yakni *community of common destiny*. Disamping sebagai pembendung pengaruh Barat, *community of common destiny* juga sebagai konsep China dalam menafsirkan globalisasi ekonomi ala China. China berupaya untuk membuktikan kepada Barat bahwa China dapat menciptakan globalisasinya sendiri dengan prinsip-

prinsip China (The Diplomat, “*Globalization with Chinese Characteristics: A New International Standard?*”, 9 Mei 2017).

B. *Community of Common Destiny* sebagai Manifestasi Globalisasi Ala China dalam proyek *One Belt and One Road* (OBOR)

Setidaknya terdapat tekanan dari domestik yang sama kuatnya dengan tekanan internasional dalam mempengaruhi China untuk memilih *community of common destiny* dan OBOR. Prinsip sosialisme dengan karakteristik China dimaknai lebih dari globalisasi ekonomi, tetapi juga infiltrasi budaya China kepada dunia luar. Terdapat sepuluh gagasan sosialisme dengan karakteristik China pada era Xi Jinping; 1) Berpusat pada masyarakat; 2) Partai berkuasa yang kuat; 3) Mengumpulkan sumberdaya; 4) Demokrasi yang efektif; 5) Kemampuan untuk melakukan reformasi; 6) Ekonomi pasar yang inovatif; 7) Menjaga stabilitas; 8) *Win-win* dan *shared*; 9) Mengikuti jalannya sendiri; 10) Akar budaya yang kuat (Xinhuanet, “*China Focus: Socialism with Chinese Characteristics: 10 Ideas to Share with the World*”, 08 Oktober 2017).

Dalam hal ini, *community of common destiny* mencakup seluruh prinsip globalisasi dengan karakteristik China. *Community of common destiny* merupakan implementasi dari gagasan berpusat pada masyarakat, menjaga stabilitas, *win-win* dan *shared*, dan akar budaya yang kuat. Hal ini sekaligus menjawab tantangan HAM Barat yang selalu ditolak oleh China.

Community of common destiny merupakan interpretasi dari nilai konfusianisme yang berupa *tanxia* atau *All-under-heaven*. Sementara *community of common destiny* sendiri memiliki prinsip yang sama yaitu “one home for all of mankind” yang disebutkan Xi Jinping dalam pidato Tahun Baru 2017 di Kantor PBB di Jenewa

pada tanggal 18 Januari. Kesamaan prinsip tersebut mengindikasikan bahwa terdapat pola konstitutif antara norma dan kepentingan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan konstruktivisme unit-level yang telah diuraikan oleh Peter Kazekstein dalam karyanya yang berjudul *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* tahun 1996 (Katzenstein, 1996).

Kazekstein menjelaskan bahwa norma atau ide memiliki peranan penting dalam pembentukan kebijakan sebuah negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *community of common destiny* merupakan interpretasi dari nilai konfusianisme, maka prinsip *community of common destiny* tidak berbeda dari konfusianisme. Sehingga, kebijakan yang dihasilkan berkaitan dengan tujuan besarnya yaitu menciptakan konektivitas dan kesatuan dengan ide *all-under-heaven*, *one home for all mankind*, atau integrasi negara menjadi satu secara keseluruhan baik secara material maupun secara normatif. Berkaca pada pemikiran tersebut, maka proyek OBOR merupakan alat untuk mencapai konektivitas menuju tujuan besar bersama.

Selain tekanan domestik, *community of common destiny* membawa misi untuk menanggapi perkembangan globalisasi ekonomi ala Barat. Pada sebuah forum studi Marxis di Shanghai, para ilmuwan para ilmuwan memuji konsep *community of common destiny* sebagai kontribusi Sosialisme dengan karakteristik China ke seluruh dunia. Beberapa pakar seperti Cheng Weili, Wang Yonggui, dan Gong Xiaoying mengatakan bahwa *community of common destiny* memberikan pemahaman yang jelas tentang interpretasi China terutama pada pemerintahan global.

Cheng Weili, seorang peneliti dari Akademi Ilmu Sosial Shanghai, mengatakan bahwa masalah pembangunan global yang tidak merata akibat globalisasi ekonomi yang dipimpin oleh Barat, menjadi celah bagi China untuk menggantikan sistem kapitalisme dalam

globalisasi ekonomi Barat dengan sosialisme ala China. Sementara Wang Yonggui, seorang profesor Marxisme di Nanjing Normal University, berpendapat bahwa *community of common destiny* mendorong pembangunan sistem tata kelola global yang lebih adil dan lebih masuk akal dengan prinsip saling menguntungkan dan saling berbagi, dan mencerminkan komitmen China untuk dalam pembangunan global secara bersama-sama. Hal yang sama disampaikan oleh Gong Xiaoying seorang wakil direktur Sekolah Marxisme di Universitas Tongji. Pembangunan bersama yang diusung China menekankan pada tanggung jawab bersama antarnegara untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata. Pembangunan bersama merupakan konsep utama dari esensi sosialisme untuk menangani masalah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Konsep tersebut juga dapat digunakan untuk menangani permasalahan global, termasuk pembangunan yang tidak merata dan kesenjangan kelas (Chinese Social Sciences Net, “*Community of Common Destiny: Contribution of Socialism with Chinese Characteristics to the World*”, 24 Oktober 2017).

Selain pakar studi Marxisme, *community of common destiny* juga direspon baik oleh dunia internasional. Robert Gichimu Githinji anggota Parlemen Kenya menyatakan bahwa China memiliki niat yang tulus untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sejarah kegagalan dan kesuksesan China telah memberikan kepercayaan diri bagi China untuk menghasilkan gagasan dalam membuat dunia lebih baik dan lebih adil. Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Raphael Tuju sekretaris Jenderal Partai Yobika Kenya. Ia menekankan pada struktur internasional dimana keputusan penting diambil secara kolektif sehingga tidak ada negara yang ditinggalkan, serta dapat mencapai keputusan yang lebih adil untuk semua pihak (Xinhuanet, “*Spotlight: China's vision of community of shared future*

for all creates widespread resonance”, 02 Desember 2017).

Contoh lain disebutkan dalam surat kabar online *The Sun*, bahwa pemerintah Dominika mendukung *community of common destiny* yang diusung oleh China. Hal tersebut sejalan dengan moto negara yang tercantum dalam lagu nasional Dominika yaitu “All for each and each for all”. Manusia hanya memiliki satu bumi, dan itu adalah rumah untuk semua negara. Pembangunan berkelanjutan adalah hal yang sangat penting karena memegang kunci untuk memecahkan masalah dan kesulitan utama yang dihadapi dunia, dan perdamaian abadi dan kemakmuran bersama melayani kepentingan jangka panjang dan mendasar dari semua orang di dunia (*The Sun*, “*Forming the Sense of Community of Common Destiny*”, 12 November 2013).

Sebagai manifestasi dari *community of common destiny*, China mendirikan *One Belt and One Road* (OBOR) pada tahun 2013. Proyek OBOR dari daratan Cina ke Eropa mencakup lebih dari 60% populasi dunia yang tinggal di lebih dari 60 negara di Asia, Eropa, dan Afrika. Sebanyak 71 negara yang terdiri dari negara maju dan negara berkembang telah terlibat dalam proyek tersebut. Selain populasi dunia, OBOR juga mencakup 30% GDP dengan nilai sekitar 12 triliun dolar Amerika, dan 35% perdagangan dunia (*Belt and Road*, “*How Big is the Belt and Road*”, t.thn.).

Pada Pertemuan Tahunan BOAO *Forum for Asia* tahun 2015, Presiden Xi Jinping mengungkapkan komitmen Cina untuk membangun *community of common destiny* dalam proyek OBOR. Ia menyebutkan enam prinsip dalam strategi OBOR yang dirumuskan berdasarkan prinsip *communiti of common destiny*, yaitu meningkatkan kesadaran akan strategi dengan mengadvokasi nilai-nilai yang menjadi cita-cita bersama; keterbukaan, inklusivitas, dan saling menguntungkan; pendekatan multi-cabang dan seimbang; bertujuan untuk terobosan utama di tengah perkembangan progresif;

operasi berbasis pasar dengan arahan pemerintah; dan meluncurkan inisiatif baru sambil memanfaatkan sumber daya yang ada. Keenam prinsip tersebut memiliki satu rencana kerja yang menjadi landasan utama yaitu integrasi nilai.

OBOR adalah bentuk perlawanan terhadap globalisasi ekonomi ala Barat, yang mengedepankan pembangunan bersama dan *sharing idea*. Melalui OBOR, China memberikan bukti nyata kepada negara-negara yang tidak liberal di Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Timur Tengah bahwa terdapat banyak keuntungan dari menerapkan “globalisasi dengan karakteristik China” (The Diplomat, “*Globalization with Chinese Characteristics: A New International Standard?*”, 9 Mei 2017). Untuk mencapai hal tersebut, Cina bekerjasama dengan negara-negara terkait untuk membangun jalan, rel kereta api, air dan saluran udara, dan koridor logistik. Rencana tersebut secara khusus menyebutkan pembangunan koridor ekonomi berikut: *the China–Mongolia–Russia Economic Corridor* (CMREC), *the New Eurasian Land Bridge* (NELB); *the China–Central and West Asia Economic Corridor* (CWAEC); *the China–IndoChina Peninsula Economic Corridor* (CIPEC); *the China–Pakistan Economic Corridor* (CPEC), dan *the Bangladesh–China–India–Myanmar Economic Corridor* (BCIMEC) (Brødsgaard & Rutten, 2017: 257). Keenam koridor ekonomi tersebut berperan sebagai sarana transfer ilmu dari China kepada negara lain, agar negara tersebut dapat menemukan solusi yang tepat bagi permasalahan dalam negerinya.

Dalam wawancara CGTN, Laurence Brahm Pemimpin Konsensus Himalaya mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara-negara pasca kolonialisme sekarang ini adalah neo kolonialisme dari hubungan kerjasama dengan Barat. Sehingga negara-negara mencoba untuk mencari solusi bersama atas tantangan tersebut. Sementara itu, China dengan

pengalamannya yang berhasil mengangkat 700 juta orang keluar dari kemiskinan selama 30 tahun, telah menunjukkan bahwa China memiliki pengalaman lebih dalam masalah kemiskinan dan pembangunan negara. China juga menekankan bahwa problematika yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah sama. Sehingga OBOR digunakan sebagai sarana berbagi solusi untuk tantangan yang dihadapi bersama (CGTN, “*China Footprint: The Ultimate Goal of Community of Common Destiny is Win-Win*”, 20 September 2017)

Sementara itu, Zarko Obradovic Wakil Presiden Partai Sosialis Serbia mengatakan bahwa membangun *community of common destiny* sebagai tujuan masa depan bersama harus memperhatikan dan menyelaraskan rencana bersama diantara negara-negara. Dalam hal ini, OBOR memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Pemikiran tentang OBOR juga disampaikan oleh Jose Luis Robaina seorang pakar Kuba di Asia yang belajar dari Pusat Penelitian Politik Internasional di Havana. Ia mengatakan bahwa OBOR juga dapat membangun Amerika Latin. Menurutnya, China memiliki takdir yang sama tidak hanya dengan Amerika Latin, tetapi juga seluruh Dunia Ketiga. Ia menggarisbawahi pada konsep China tentang takdir bersama, yang berkaitan dengan *win-win cooperation* (Xinhuanet, “*Spotlight: China's vision of community of shared future for all creates widespread resonance*”, 02 Desember 2017).

Perilaku politik China dalam menanggapi isu global hingga membuat platform dan OBOR sebagai tandingan globalisasi ala Barat sesuai dengan konstruktivisme yang dijelaskan oleh Christian Reus-Smit, Alexander Wendt dan Peter Kazhekstein. Christian Reus-Smit mengatakan bahwa dalam membentuk perilaku negara, terdapat penggabungan konteks internasional dan tekanan domestik yang kuat untuk menciptakan tindakan politik. Sementara Alexander Wendt berpijak pada pola

konstitutif antara agen dan struktur. Sedangkan Peter Kazhekstein berfokus pada aspek domestik dari norma negara yang kuat berperan penting dalam menentukan perilaku negara yang sesuai (Burchill, Linklater, & dkk, 2005).

Berikut analisa runtutan perilaku politik China berdasarkan pemahaman Reus-Smit dan Alexander Wendt:

1. Pasar bebas dan pemerintahan ekonomi global sebagai struktur internasional yang baru. Berdasarkan tekanan domestik berupa prinsip dan ideologi negara, China tidak dapat serta-merata menerima sistem tersebut. Sehingga terjadi interpretasi oleh China yang disesuaikan dengan prinsip sosialisme ala China.
2. Dari interpretasi tersebut, China kemudian melakukan tindakan untuk melawan prinsip-prinsip Barat yang digunakan dalam pasar bebas dan pemerintahan ekonomi global dengan mencetuskan *Community of Common Destiny*.
3. *Community of common destiny* digunakan untuk mengartikulasikan pemahaman China terhadap globalisasi ekonomi ala China. Kemudian China mendirikan OBOR yang digunakan sebagai alat utama dalam manifestasi globalisasi ala China.